

**Tajuk Rencana****Kerumunan Rizieq**

Kembalinya Rizieq Syihab setelah sekitar 3,5 tahun berada di Arab Saudi membuat heboh. Kerumunan yang terjadi di sejumlah tempat terkait kedatangan dan acara yang diperbolehkan oleh pemerintah menjadi klasik baru pernyebutan Covid-19 dan membuat pandemi menjadi berkepanjangan.

Setelah lebih dari 8 bulan Satgas Penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat berupaya menerapkan protokol kesehatan, khususnya mendakwa kerumunan, hanya dalam waktu singkat setelah kedatangan Rizieq, semuanya seolah menjadi percuma. Kerumunan serukan lagi pelepasan, khususnya di DKI Jakarta, yang masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejumlah pejabat pun larut dalam kerumunan, bahkan seakan memberi lampu hijau.

Kenyataan itulah yang akhirnya membuat publik bersuara, terutama melalui media sosial. Mereka menilai Pemprov DKI Jakarta diskriminatif. Acara pernikahan, kegiatan keagamaan, dan sejumlah event masyarakat umum boleh digelar, tetapi jumlah orang yang hadir sangat dibatasi dan diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Sebaliknya, acara Rizieq Syihab, yang menimbulkan kerumunan ribuan orang diblokir tetapi berlangsung, bahkan difasilitasi.

Kita mendukung langkah Kepolisian yang bertindak tegas terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran selama PSBB. Sebagaimana hukum, aparat Kepolisian wajib menegakkan semua peraturan yang ada di negeri ini, termasuk UU Kekarantinaan Kesehatan.

an selama masa PSBB. Pasal 93 UU 6/2018 menyebutkan, "Seluruh orang yang tidak mematuhi pernyelenggaraan kekarantinaan kesehatan selanjutnya dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menganggap-hangsi pernyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjarahan lima (5) tahun dan/atau pidana derita paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)."*

Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan, setiap orang wajib mematuhi pernyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

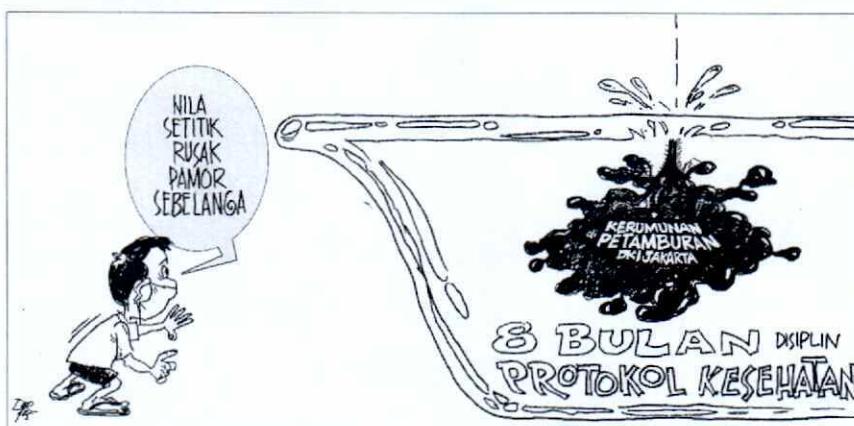
Kita mendukung langkah Kepolisian yang bertindak tegas terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran selama PSBB. Sebagaimana hukum, aparat Kepolisian wajib menegakkan semua peraturan yang ada di negeri ini, termasuk UU Kekarantinaan Kesehatan.

UU itu dibuat untuk melindungi keselamatan sekuuh warga negara. Tidak boleh satu orang pun yang melanggarinya, apalagi dilakukan dengan serjaga. Pandemi Covid-19 telah membuat rakyat Indonesia menderita. Sampai kematican 15.393 orang meninggal, termasuk dokter dan perawat. Puluhan triliun rupiah diajak negara untuk menangani sektor kesehatan selama pandemi. Sektor ekonomi pun turun-turun, sehingga saat ini kita mengalami resesi.

Mengingat dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa, sudah sepertinya seluruh warga negara mengambil peran untuk mencegah laju penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan, di samping memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun.

Oleh karena itu, langkah hukum oleh Kepolisian dengan memanggil sejumlah pejabat di DKI Jakarta, mulai kurang hingga gembira, termasuk Rizieq Syihab, patut diulang. Siapa pun yang terbukti melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan harus mempertanggungjawabkan perturannya.

Seperti yang diampaikan Presiden Jokowi, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Oleh karena itu, Jokowi meminta Kapolda, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan. Langkah tegas Kepolisian dalam kasus kerumunan Rizieq merupakan pelajaran berharga agar ke depan tidak ada lagi kerumunan yang bisa membuat upaya pengendalian Covid-19 menjadi lemah laju dan memakan biaya.



Pandemi Covid-19 dan Komunikasi Sains

Indonesia dan sejutaan besar negara dunia sudah menghadapi pandemi Covid-19 lebih dari 8 bulan. Tercatat, lebih dari satu juta kematian akibat Covid-19. Inilah pandemi terburuk pada satu abad terakhir setelah Flu Spuyol.

Berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh seluruh pemerintah negara. Pemerintah Indonesia pun hari-hari ini masih harus berjuang keras. Meski jumlah kematian harian turun, tetapi data *fatality rate* di Indonesia tetap tertinggi se-ASEAN sebesar 3,3% (*Our World in Data*, 15/11/2020).

Kajian penanganan dan dampak pandemi Covid-19 telah dilakukan di berbagai sektor. Mutu dan bidang kesehatan, ekonomi, diplomasi, politik, pendidikan, media, dan lain-lain. Para ahli di seluruh dunia silih berganti hasil riset. Kendati demikian, sebagian besar publik, khususnya di Indonesia, tidak mudah bisa mengakses informasi dasar tentang pandemi dan cara menghadapinya.

Data survei Econmark Consulting (Pandamsari, 2020) menunjukkan 47% responden menyatakan dirinya awam dengan pandemi Covid-19, sementara 45% cenderung mencoba mengeksplorasi informasi lebih jauh soal pandemi.

Data tersebut cukup menarik, karena 47% cenderung akan dengan mudah berlalu wacana atau rumor yang sepintas didengarnya.

Jika mereka aktif di grup WhatsApp rukun tetangga (RT), misalnya, mereka akan mudah percaya dengan informasi yang dibagikan di grup tersebut.

Tak heran jika ada beberapa orang mudah percaya bahwa komunitas terkecil—misalnya keluarga, pertemanan, atau lingkungan tempat tinggal mereka—merupakan sumber penularan virus corona. Apalagi, jika informasi ini didengarkan oleh tokoh berpengaruh yang dianugerahi *opinion leader*.

Data lain menunjukkan bahwa 45% responden cenderung berusaha mengeksplorasi informasi. Hal ini perlu dikritik lebih lanjut. Ini penting karena aktif mencari informasi belum tentu memberikan garansi akurasi informasi yang mereka terima.

Kita sadar ada ancaman misinformasi dan disinformasi di konten buatan pengguna (*User Generated Content*).

Media juga cenderung memberikan panggung pada aktivitas-aktivitas pelanggaran protokol kesehatan ma-

cam ini. Tidak bisa dimungkiri jika kondisi ini berkorelasi dengan *false hope* aka vaksin Covid-19 yang selama ini dianggap sebagai *savior panitia*.

Komunikasi Sains

Putusnya jembatan komunikasi para ahli dengan publik terjadi karena adanya perbedaan titik tolak atau sains. Para ahli cenderung fokus pada aspek-aspek ilmiah dan publikasi. Tak heran jika hasil-hasil riset para ahli berahir di jurnal ilmiah. Padahal, masyarakat cenderung membutuhkan pesan yang sederhana, mudah dipahami dan menarik. Kajian komunikasi sains menunjukkan menghubungkan *missing link* itu.

Kommunikasi sains hadir sejak abad ke-19. Ketika itu, disadari pentingnya pemeringkatan bahasa saintifik agar masyarakat menyerapnya.

Satu satunya, kali pertama ahli



PUJI NUGRAHA ARIFIN

(text) yang disusul dengan narasi menyajikan pada platform media sosial.

Satu satunya, kali pertama ahli

menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 akan tersedia pada akhir 2020.

Ria ambi contoh wacana vaksin Covid-19. Sejak akhir September 2020, pemerintah mulai membangun wacana publik bahwa vaksin Covid-19 bisa diterima masyarakat pada akhir 2020 atau awal 2021.

Sekujat itu, pemberitaan soal rancangan vaksin tidak pernah lepas dari hinggar-hinggar media dan diskusi publik. Tingginya harapan publik Indonesia terhadap hadirnya vaksin ini bisa dimulai karena masyarakat mudah fokus utama dalam konteks pembangunan berbasis modernitas.

Contoh kecil, misalnya, rancana pembangunan berbasis teknologi oleh pemerintah kepada komunitas di pedesaan yang lebih meningkatkan pada aspek teknis tanpa memperhatikan konteks sosio-demografi masyarakat setempat (Yudhawati, 2019).

Efektivitas komunikasi sains membutuhkan kolaborasi yang baik dari berbagai aktor. Para ahli hidang tertentu membutuhkan bantuan dari para ahli bidang komunikasi yang baiknya kurangnya saluran.

Bila tidak hati-hati, penerapan ko-

munikasi sains di lapangan bisa menjadi *blunder*, karena sebaliknya bisa terjebak pada prinsip keseleruhan informasi dengan mengeliminasi informasi penting dan justru memunculkan narasi lain yang cenderung bisa disalahartikan.

Hal itu terjadi, misalnya, ketika Satgas Penanganan Covid-19 Indonesia pada Senin (9/11) lalu menyampaikan bahwa orang Indonesia masuk kategori paling optimistik se-ASEAN dalam menatuk pandemi Covid-19. Pernyataan ini bisa saja salahartikan sebagian masyarakat menjadi lebih longgar dalam menerapkan protokol 3M berbekal optimisme tersebut.

Terwujudnya komunikasi sains yang efektif terap meneutri tiga kriteria.

Periana, kurang mampunya ilmuwan menyuntik bentuk tulisan populer karena lebih terbiasa menulis artikel jurnal ilmiah. *Kedua*, itu-itu ilmuwan dianggap tidak memiliki nilai berita.

Ketiga, mental batah masyarakat yang cenderung menghindari pembahasan ilmiah yang dianggap berat.

Menjawab kendala tersebut, para ahli perlu menyusun narasi ilmiah dengan pendekatan produksi video/film, *viral art*, pertunjukan seni/musik, infografik, kartun, media sosial dan sebagainya yang sesuai dengan target khalayaknya.

Kita tidak bisa membiarkan ancaman mengendong semangat sebagian besar masyarakat yang sudah baik dalam menciptakan protokol karena melihat sekelompok orang yang salah mengambil keputusan karena rendahnya literasi pada informasi ilmiah tentang Covid-19.

PENERIMA ALIH
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Para ahli bidang tertentu membutuhkan bantuan dari para ahli bidang komunikasi yang mengetahui cara berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat menggunakan berbagai saluran.

Silakan pura-pura (PP) atau akademik bahwa seorang teman yang baru kembali dari studi di Inggris ini mencantumkan pada konten tulisannya.

SP suarapembaruan.com

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS *Impacting Lives Through News You Can Trust.*

Dewan Redaksi: Theo Lumbaga (Ketua), Markus Permadji, Syiah Hendarwijaya, Bakhtendra Pravito MSc, Ir. Jonithan L. Pirapak MSC, Didit J. Rachibi, Samuel Taibi, Penulisah Senior: Samuel Taibi, Redaktur Pelaksana: Dwi Angga Santosa, Asisten Redaktur Pelaksana: Amineh Bata, Asni Ovi Dengan Polon, Redaktur: Alexander Madji, Bernadius Wijaya, Irwandi Diah Astuti, Spinrus Ed Hartanto, Surya Leimena, Unggu Winuwara, Willy Masuhera Indrachyo, Asisten Redaktur: Elvira Anna Soehana, Carlos KY Parikh, Heni S. Suka, Jeni Montesori, Jenny A Apissa, Yulianto Stumarong, Staff Redaksi: Adrieno Christian Sudiarto, An Supriyanti Ilhan, Beby Maheuani, Jelit, Carlos KY Parikh, Charles Roy Falerta, Chalindit Fluri, Dina Riri Astra, Dina Manafe, Erwin C Sihambing, Fina PS Putra, Farouk Amzat, Gardi Gaziran, Hendro D Sihamong, Herman, Hotman Siregar, Joni De Sajgoa, Leny Trisna Tambun, Lona Oliveira, Maria Fatima Bona, Markus Junianto Shihab, Natasia Christy Wahyuni, Robertus Wardi, Ruli Semiono, Yennira Sukyo, Yusufin Pard, Ade Marsile (Bandung), Fauzia Sari Evans (Popokarta), Nyamand Marinka (Depok), Laurensius Damit Gorang, Arnold H Sistantu (Medan), John Erlton Lory (Palu), Mikael Niman (Bekasi), Radesman Saragih (Jambi), Robert Isidors Vanwir (Rupua), Stefy Henri (Semarang), Utman (Bengkulu), Kepala Sekretariat Redaksi: Rully Saridi, Koordinator Tata Letak: Rommy Lukumahwa, Koordinator Grafis: Antonius Budi Nurchaya.

Advertising: General Manager: Djemmy Pethers, Senior Manager: Benedictus Utoro, Arlan Damawan, Marketing & Event Management: General Manager: Sari Delona, Manager: Henry Wardiyanto, Event Officer: Balqis Muliyati.

Circulation: Anson Naungsang, Finance: Anna Raniyah, Alamat Iklan: BeritaSatu Plaza, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta 12950, Telepon (021) 2991 7500; Fax: (021) 5277 981

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS: Chief Executive Officer: Nicky Hogan, Chief Operating Officer: Anthony Wongson, News Director: Primus Dhinuwita, Finance Director: Lukman Djaja, Editor at Large: John Riedy

http://www.suarapembaruan.com e-mail: koransp@suarapembaruan.com

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri. Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungan pemberitaan.